

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Inovasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai implementasi kebijakan yang tidak berjalan semestinya sebagai sebuah kebijakan. SAKPOLE memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Jawa Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah sebagai pelaksana. Hal tersebut didasari atas data dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Pertama dari segi Komunikasi, pihak penyelenggara dalam hal ini Bapenda Jawa Tengah telah melakukan upaya komunikasi berupa sosialisasi dan membangun komunikasi dalam SAKPOLE, akan tetapi pelaksanaan tersebut belum memenuhi adanya kejelasan, transmisi, dan konsistensi seperti yang dijelaskan oleh Edward III sebagai kebijakan yang terarah. Selanjutnya, dari segi Sumber Daya, Bapenda Jawa Tengah telah menyediakan berbagai sumber daya manusia dan fasilitas sebagai penunjang SAKPOLE, tetapi dalam pelaksanaannya penyediaan sumber daya tersebut tidak mampu memberikan dampak yang cukup efisien bagi masyarakat di Kota Semarang.

Ketiga, untuk memenuhi indikator Disposisi sebagai sikap dan komitmen penyelenggara terhadap kebijakan, Bapenda Jawa Tengah mampu mendorong pegawai yang berkarakter dan memiliki integritas kerja untuk mencapai nilai komitmen dalam SAKPOLE. Bapenda Jawa Tengah mampu mendorong implementor untuk memiliki kemauan, keinginan, dan kecenderungan

mengembangkan SAKPOLE, hal ini menjadi salah satu keunggulan Bapenda Jawa Tengah sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan. Dan yang terakhir, dalam indikator struktur birokrasi, Bapenda Jawa Tengah bersama pihak terkait telah menyediakan struktur birokrasi yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur, meski dalam pelaksanaannya acuan struktur birokrasi tersebut belum berjalan dengan baik dan efisien.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dinyatakan pada Subab 4.1, maka beberapa saran dapat diberikan oleh peneliti yang sifatnya mampu membangun implementasi SAKPOLE sebagai kebijakan yang efisien seperti yang diharapkan oleh George C. Edward III, diantaranya;

1. Pertama, Bapenda Jawa Tengah bersama pihak terkait sebagai penyelenggara SAKPOLE perlu melakukan evaluasi yang konsisten. Hal ini bertujuan agar pelaksana SAKPOLE mampu mendeteksi kendala lebih dini agar tidak terjadi kendala lagi.
2. Kedua, Keberadaan masyarakat menjadi kunci utama dari SAKPOLE sebagai pengguna, karenanya keluhan masyarakat melalui platform komentar SAKPOLE di *Googleplay Store dan sosial media* seharusnya juga menjadi perhatian penting bagi Bapenda Jawa Tengah dan pihak penyelenggara untuk mersepon permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu diperlukan adanya pemanfaatan kembali sosial media yang lebih interaktif oleh Bapenda Jateng, agar masyarakat di Kota Semarang mampu terakomodir kehadirannya oleh Bapenda Jawa Tengah sebagai penyelenggara kebijakan SAKPOLE.

3. Ketiga, diperlukannya adanya tambahan sumber daya fasilitas yang lebih menunjang dan terintegrasi dalam satu sistem teknologi informasi, agar mampu memberikan pengaruh dalam standar operasional prosedur yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

